

**KARAKTERISTIK EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN DARAT BERBASIS
NILAI-NILAI NYAMABRAYA**

Oleh:

I Gede Astra Wesnawa dan I Gede Sudirtha
igedeastra62@gmail.com, sudirtha.gede@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Bali selama 3 (tiga) tahun, dengan tujuan untuk menghasilkan model pengelolaan wilayah perbatasan darat berbasis konsep Nyamabraya. Dengan konsep kearifan lokal ini konflik di wilayah perbatasan provinsi, kabupaten, dan desa di Bali dapat dihindari atau diminimalisir, sehingga terjadi keajegan wilayah bahkan keutuhan NKRI tetap lestari. Salah satu tujuan khusus dari penelitian Tahun I adalah mengidentifikasi karakteristik ekonomi, sosial budaya masyarakat dalam pengelolaan wilayah perbatasan darat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan paradigma penelitian pengembangan tipe *prototypical studies* yang dipadukan dengan metode analisis reflektif. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik observasi, dokumentasi, wawancara, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik ekonomi masyarakat perbatasan adalah dominan pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Karakteristik sosial budaya masyarakat dalam pengelolaan wilayah perbatasan darat dengan “desa kala patra” yang diselaraskan dengan konsel Tri Hita Karana.

Kata kunci: Karakteristik ekonomi dan sosial budaya, Perbatasan, Nyamabraya

**CHARACTERISTICS OF ECONOMIC AND SOCIO-
CULTURAL SOCIETY IN THE MANAGEMENT
OF LAND BASED BOUNDARY AREAS
NYAMABRAYA VALUES**

This research was conducted in Bali Province for 3 (three) years, with the aim to produce model management of land border area based on Nyamabraya concept. With the concept of local wisdom, conflicts in the border areas of provinces, districts, and villages in Bali can be avoided or minimized, resulting in the territorial stability and even the integrity of the NKRI remains sustainable. One of the specific objectives of the research of Year I is to identify the economic characteristics, socio-cultural community in the management of terrestrial border areas. To achieve these objectives, research is done using the paradigm of

development of prototypical studies, combined with reflective analysis methods. Research data collected by observation technique, documentation, interview, then analyzed qualitatively. The results show that the characteristics of border communities are dominant in agriculture, plantation and livestock. Characteristics of economy, socio-cultural society in the management of land border areas with "desa kala patra" which is harmonized with the Tri Hita Karana.

Keywords: characteristic economy, social culture, Border, Nyamabraya

PENDAHULUAN

Semua negara tidak bisa disebut sebagai negara yang merdeka dan berdaulat apabila tidak mempunyai faktor eksistensial yang disebut wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu. Kondisi objektif Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara geografis adalah sebuah negara yang memiliki wilayah tertentu yang bukan merupakan sebuah benua atau daratan semata, tetapi sebuah negara yang wilayahnya merupakan kesatuan dari tiga dimensi wilayah yaitu darat, laut, dan udara serta memiliki konfigurasi teritorial dengan ciri khusus sebagai satu Negara Kepulauan.

Dalam perkembangannya, Indonesia saat ini, terdiri dari 34 provinsi. Dari 34 provinsi tersebut, 5 (lima) di antaranya memiliki status khusus sebagai daerah khusus, yaitu: Aceh, Jakarta, Papua, Papua Barat, dan Yogyakarta. Dari ke-34 provinsi tersebut, 10 (sepuluh) di antaranya terletak di Pulau Sumatera, 6 (enam) di Pulau Jawa, 5 (lima) di Pulau Kalimantan, 6 (enam) di Pulau Sulawesi, 3 (tiga) di Kepulauan Nusa Tenggara, 2 (dua) di Kepulauan Maluku, dan 2 (dua) lainnya terletak di Pulau Papua (http://id.wikipedia.org/wiki/provinces_blank_map.svg).

Dari 34 provinsi tersebut, sepuluh provinsi di antaranya berbatasan dengan negara tetangga, seperti ditunjukkan dalam Gambar 1.

Batas wilayah negara Indonesia tersebar di 10 kawasan, baik di darat maupun di laut. Kawasan perbatasan darat tersebar di 3 (tiga) kawasan yaitu: (1) Kawasan Perbatasan Darat RI- Malaysia di Pulau Kalimantan; (2) Kawasan Perbatasan Darat RI dengan PNG di Papua; (3) Kawasan perbatasan darat RI dan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur.

Garis batas negara di Pulau Kalimantan antara RI dan Malaysia terbentang sepanjang 2004 km, di Papua antara RI dan Papua Nugini (PNG) terbentang sepanjang 107 km, dan di Nusa Tenggara Timur antara RI dan Timor Leste terbentang sepanjang kurang lebih 263,8 km. Sementara itu, Kawasan Perbatasan Laut termasuk pulau-pulau kecil terluar berada di 7 kawasan.



Gambar 1. Perbatasan RI dengan 10 Negara Tetangga

Perbatasan merupakan kawasan strategis terkait integritas dan kedaulatan wilayah negara yang memerlukan pengelolaan secara khusus. Pengelolaan kawasan perbatasan diperlukan untuk memberi jaminan kepastian hukum mengenai ruang lingkup, batas kewenangan pengelolaan wilayah dan sumberdaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat suatu wilayah baik provinsi, kabupaten kota, kecamatan sampai dengan unit terkecil.

Salah satu di antara provinsi tersebut adalah Provinsi Bali. Provinsi Bali memiliki 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota madya. Masing-masing kabupaten berbatasan minimal dengan 3 (tiga) kabupaten. Permasalahan perbatasan dengan kabupaten yang ada tersebut belum terselesaikan secara tuntas, seperti masih banyak permasalahan delimitasi batas wilayah, aktivitas berkaitan dengan ekonomi serta sosial budaya masyarakat yang tinggal di perbatasan yang tidak menutup kemungkinan perlu dibuat kesepakatan bersama antar kabupaten

dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang ada di perbatasan. Semua aspek permasalahan perbatasan tersebut akan berpengaruh pada bidang pertahanan keamanan suatu wilayah.

Pengelolaan perbatasan negara merupakan rangkaian akhir dari proses pembentukan perbatasan. Stephen B. Jhones, dalam Sutisna (2008) menegaskan, bahwa aspek *management* (pengelolaan) perbatasan negara merupakan pekerjaan yang bersifat kontinu. Sebab, di dalam kegiatan pengelolaan tersebut menyangkut banyak aspek yang terkait dengan pelaksanaan kedaulatan negara itu sendiri, seperti pemeliharaan patok batas negara, lalu lintas orang dan barang, serta persoalan pertahanan dan keamanan negara itu sendiri. Dengan demikian, sudah sewajarnya bila wilayah perbatasan memerlukan sebuah mekanisme pengelolaan yang terintegrasi dan berkesinambungan karena di ruang perbatasan tersebut akan selalu terjadi interaksi dengan wilayah tetangga, baik positif maupun negatif.

Berbagai program pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan kawasan perbatasan, baik secara fisik maupun sosial-ekonomi dan budaya masyarakatnya. Namun demikian, kondisi perbatasan tidak banyak mengalami perubahan, masyarakatnya tetap tertinggal dari perkembangan yang terjadi di daerah pusat.

Penelitian Ganewati Wuryandari, dkk (2008) tentang Model alternative pengelolaan keamanan kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste dengan menggunakan kombinasi pendekatan eksternal dan internal dalam pengelolaan perbatasan, merekomendasikan tentang pilihan-pilihan atau tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah keamanan di perbatasan baik dalam aspek kebijakan maupun implementasi.

Dari berbagai model pengelolaan wilayah perbatasan yang ada, masih menyisakan permasalahan dalam penanganan masalah perbatasan yang harus dicarikan jalan ke luar. Penanganan masalah wilayah perbatasan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat saja, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah. Pengelolaan wilayah perbatasan masih banyak terfokus pada perbatasan laut yang dirasakan mempunyai permasalahan yang lebih sering terjadi dan kompleks. Namun, permasalahan batas darat juga mempunyai dampak yang sangat kompleks

dalam pembangunan, baik pembangunan fisik (lingkungan) maupun sosial budaya dan ekonomi. Dengan adanya perubahan pandangan arah pembangunan untuk saat ini dan dimasa depan, sektor darat perlu jaminan kepastian hukum dan penegakan hukum kegiatan di perbatasan, sehingga pembangunan fisik, sosial budaya dan ekonomi pada lingkungan perbatasan dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Kesadaran terhadap persepsi wilayah perbatasan antar wilayah mendorong para birokrat dan perumus kebijakan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali untuk melakukan pengelolaan wilayah perbatasan darat. Hal ini menjadi isu strategis karena pengelolaan kawasan perbatasan darat terkait dengan proses *nation state building* terhadap kemunculan potensi konflik internal di suatu wilayah dan atau dengan wilayah lainnya (*neighbourhood region*).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kehidupan masyarakat Bali dikenal dengan keramahtamahan dan kehidupan sosial budaya yang didukung dengan kearifan lokal. Salah satu konsep normative dari kearifan lokal yang ada di Bali adalah “nyamabraya” dengan konsep ini sesungguhnya hubungan individu dalam masyarakat Bali terjalin erat, namun dalam kenyataannya sering terjadi konflik dengan sesama dalam pemanfaatan sumberdaya yang ada di daerah perbatasan, di antaranya konflik perebutan mata air di wilayah Hutan Baong Kambing yang termasuk wilayah Kabupaten Bangli antara Desa Bondalem dan Desa Tejakula tahun 2010 (Bali Post, 13 Januari 2010). Konflik perbatasan antara warga Desa Ulakan dan Desa Antiga Kabupaten Karangasem bentrok memperebutkan tapal batas yang di dalamnya terdapat depo Pertamina Manggis pada tanggal 11 April 2005. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang: Pengembangan model Pengelolaan Wilayah Perbatasan Darat Berbasis Nilai-nilai “Nyamabraya” dalam Rangka Menjaga Keajegan Bali dan Keutuhan NKRI (Kasus Provinsi Bali). Salah satu tujuan pertama untuk mengidentifikasi karakteristik sosial budaya masyarakat dalam pengelolaan wilayah perbatasan darat..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Bali. Sebagai daerah tujuan wisata, Provinsi Bali memiliki berbagai daya tarik, di antaranya daya tarik wisata budaya dan alam yang didukung dengan keramahtamahan penduduknya. Namun, dalam perkembangannya cukup banyak konflik yang terjadi antar desa di kawasan perbatasan daratnya.

Fokus utama dari penelitian ini adalah mengembangkan model pengelolaan wilayah perbatasan berbasis konsep nyamabraya, model rekayasa sosial pengelolaan perbatasan berbasis nyamabraya, dan rekomendasi kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan berbasis nyama braya. Berdasarkan rasional tersebut, maka penelitian ini menggunakan desain penelitian pengembangan tipe *prototypycal studies* sebagaimana yang dikemukakan oleh Akker (1999) dan Ely dan Plomp (2001). Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian pengembangan adalah kualitas perangkat produk yang dihasilkan. Plomp (2001), memberikan kriteria kualitas produk adalah: valid (merefleksikan pengetahuan *state of the art* dan konsistensi internal), mempunyai nilai tambah (*added value*) praktis dan efektif. Secara umum Plomp (2001) menyatakan bahwa pelaksanaan penelitian pengembangan meliputi tiga fase yaitu: fase analisis hulu hilir (*front end analysis*), fase pengembangan prototipe dan fase penilaian. Bertalian dengan fokus masalah penelitian ini yaitu pengembangan model pengelolaan wilayah perbatasan darat berbasis nyamabraya yang benar-benar valid, praktis dan efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik ekonomi dan sosial budaya dalam pengelolaan perbatasan darat

Keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan sosial budaya, dan ekonomi di daerah perbatasan yang dikembangkan bersifat saling menunjang satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan sosial budaya dan ekonomi dapat diwujudkan, diperlukan integrasi rencana pengembangan,

sinkronisasi program, dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di antara para pemangku kepentingan.

Karakteristik ekonomi

Karakteristik ekonomi penduduk di wilayah perbatasan yang dominan adalah aktivitas ekonomi di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Untuk pengembangan, dibutuhkan strategi pengembangan perekonomian, khususnya pengembangan investasi, diupayakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan perkembangan antar wilayah kecamatan adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatkan pertumbuhan struktur perekonomian wilayah yang lebih seimbang dengan meningkatkan diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada beberapa komoditas utama saja, sekaligus perluasan pasarnya. Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah di perbatasan, dengan sendirinya akan mendorong sektor sektor lain lebih menggeliat, misalnya pendidikan, kesehatan, aktivitas penduduk dalam bidang ekonomi, (2) Pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan sektor/subsektor pertanian tanaman pangan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Di daerah perbatasan yang potensial seperti bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dimanfaatkan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, agar pemanfaatan potensi tersebut tidak merusak lingkungan. Justeru masyarakat diperbatasan menyadari bahwa lingkungan harus dilestarikan demi keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada, (3) Peningkatan kemudahan bagi tumbuhnya investasi untuk pengembangan sektor/subsektor strategis terutama melalui pembangunan infrastruktur, insentif-disinsentif bagi investasi swasta, (4) Pengembangan potensi ditempuh dengan mengarahkan kawasan budidaya tertentu pada daerah-daerah yang berpotensi baik menurut potensi fisik, spasial, maupun menurut komoditas unggulan yang ada, dan (5) Dalam upaya mengatasi masalah, memprioritaskan penanganan wilayah-wilayah yang menghadapi permasalahan antara lain: lahan kritis, rawan bencana/lingkungan rawan, daerah tertinggal, kawasan cepat berkembang melalui identifikasi wilayah prioritas beserta penyusunan dan pelaksanaan program penanganannya.

Karakteristik sosial budaya

Masyarakat Bali dimana pun berada dalam lingkup wilayah Bali memiliki kekhasan dalam budaya, yang dikenal dengan konsep desa kala patra, atau tempat, waktu dan keadaan/kondisi. Konsep ini diseimbangkan dengan tri hita karena atau tiga cara penyebab kebahagiaan/keharmonisan, yaitu keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungan. Salah satu keharmonisan hubungan itu adalah antara manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungan di daerah perbatasan. Keharmonisan hubungan ini menyebabkan kerusakan lingkungan di perbatasan dan konflik diperbatasan dengan sentuhan konsep nyamabraya konflik dapat diminimalisir. Konsep yang mengakar di masyarakat Bali berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat di Bali adalah 'sad kertih' yang dijelaskan sebagai enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari atma kertih, wana kertih, danu kertih, segara kertih, jana kertih dan jagat kertih. Di dalam lontar Mpu Kuturan disebutkan bahwa Bali sebagai Padma Bhuwana, yaitu pusat dunia, segalanya bermuara di Bali agar segala kehidupan mencapai kesejahteraan; mokhsartam jagatdharma ya ca iti dharma, di dalam menata ruang Bali yang terbatas ini diperlukan ketaatan manusia Bali akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup yang menjaga kelangsungan kehidupan dengan melaksanakan ke enam komponen sad kertih, yaitu: (1) Atma Kertih adalah jiwa dan rohani yang harus dilestarikan dengan melakukan penataan ketertiban hidup beragama di Bali melalui pemeliharaan fasilitas tempat suci, parhyangan atau pura yang kebanyakan digunakan sebagai ritus keagamaan, dan dikembangkan juga sebagai pusat pendidikan keagamaan yang dilengkapi sarana dan prasarannya, (2) Wana Kertih adalah tumbuh-tumbuhan dan segala isinya yang diwujudkan dalam bentuk hutan, yang harus dilestarikan dengan membangun pura alas angker di setiap kawasan hutan, untuk menjaga hutan secara niskala (spiritual), (3) Danu Kertih adalah kesucian sumber-sumber air, yang harus dilestarikan dengan melarang melakukan pencemaran sumber-sumber air seperti meludah, kencing, membuang kotoran, membuang sampah, dan membuang zat beracun, (4) Segara Kertih adalah laut

atau samudera sebagai sumber alam tempat leburnya semua kekeruhan, yang harus dilestarikan dengan tidak melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan pesisir dan laut serta menjaga nilai-nilai kesucian dan keasriannya, (5) Jana Kertih adalah sumber daya manusia baik secara individu maupun berkelompok, yang harus dibangun dengan meningkatkan kualitas masyarakat Bali yang handal dan berdaya saing tinggi untuk menjaga keberlanjutan dan kejegan pembangunan, dan (6) Jagat Kertih adalah sosial budaya masyarakat yang terintegrasi dalam lingkungan Desa Pakraman yang harus dilestarikan dengan menjaga keharmonisan kehidupan sosial budaya yang dinamis. Dalam sistem desa ini dibangun suatu keharmonisan antara hubungan manusia dan Ida Hyang Widhi dengan *sradha* dan *bhakti*, hubungan antara manusia dan sesama berdasarkan saling pengabdian '*paras-paros sarpanaya salumlum sebayantaka*', hubungan antara manusia dan lingkungannya berdasarkan kasih sayang. Hubungan ini merupakan hubungan timbal balik yang disebut *Cakra Yadnya*. Dalam *Bhagawagitha* disebutkan hubungan tersebut akan menimbulkan suasana sosial yang menjamin setiap orang dapat menjalankan *swadharma*-nya masing-masing. Dalam pengelolaan perbatasan dengan memberdayakan kearifan lokal yang ada di wilayah perbatasan, lingkungan dapat dilestarikan dan konflik perbatasan dapat diminimalisir.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Karakteristik sosial budaya masyarakat dalam pengelolaan wilayah perbatasan darat yang telah teridentifikasi adalah: karakteristik ekonomi penduduk yang dominan adalah sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Dalam pengembangan sektor ekonomi dibutuhkan strategi pengembangan melalui upaya peningkatan pertumbuhan dan pemerataan antar wilayah di perbatasan. Karakteristik sosial budaya yang ditunjukkan oleh adanya konsepsi desa kala patra, yang diseimbangkan dengan konsep *tri hita karana*. Konsep *tri hita karana* (tiga penyebab keharmonisan/kebahagiaan) salah satu keharmonisan hubungan di

perbatasan adalah adanya sentuhan konsep nyamabraya, sehingga konflik dapat diminimalisir.

Saran

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan darat perlu mengedepankan kearifan lokal yang ada di wilayahnya. Kearifan lokal yang dimiliki oleh suatu wilayah, masyarakatnya memiliki kepercayaan akan keyakinan dan tetap menyelenggarakan kehidupannya dengan berpedoman pada kearifan lokal yang diyakininya. Dengan mengedepankan kearifan lokal yang ada konflik dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Akker, Van den J. (1999). Principles and methods of development research. In J. van den Akker, R. Branch, K. Gustafson, N. Nieveen, & T. Plomp (Eds.), *Design approaches and tools in education and training* (pp. 1-14). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Alan Collins, (2005). *Security and Southeast Asia. Domestic, Regional, and Global Issues*. New Delhi : Viva Books Private Limited.
- Astra Wesnawa, I Gede. (2010) Dinamika Pemanfaatan Ruang Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Buleleng Bali. *Jurnal Geografi UMS Surakarta* Terakreditasi Dirjen Dikti. ISSN 0852-2682 Vol.24 No. 1 Juli 2010.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia, (2011). *Materi Pelatihan Peningkatan Kapasitas Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara dalam rangka Pemantapan Ketahanan Perbatasan*
- Ely, Donald P. & Plomp, Tjeerd. (2001). *Classic Writings on Instructional Technology*. Englewood, Colorado: Libraries Unlimited, Inc.
- John Baylis & Steve Smith, (2002). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford University Press, *Dalam Alison Brysk, Globalization and Human Rights*, University of California Press.

- Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (*Partnership*). (2011). Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kepulauan Riau http://www.kemitraan.or.id/uploads_file/20110701114821.Policy%20Recommendation%20KEPRI%20web.pdf
- Lukito, S. Sutisna, S. dan Sumaryo, (2008). *Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia*, (Makalah) disampaikan pada Workshop Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Jurusan Ilmu HI/UPN Veteran, Yogyakarta, 18 Agustus 2008.
- Moeldoko, (2014). “Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan: Tinjauan dari Perspektif Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia” dalam *Makalah Seminar “Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ketahanan Nasional”*. Universitas Tanjungpura Pontianak, tanggal 8 Mei 2014. Tidak dipublikasikan.
- Rizal Darmaputra, (2009). “Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan”, *Toolkit Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil*, IDSPS dan DCAF: Jakarta, hal. 3
- Soesetyo, T.H. (2007). *Optimalisasi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Maritim RI – PNG dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI*.
- Sunarso, (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, (2009). *Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi Permasalahan dan Strategi Penanganan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sutisna, Lukita, dan Sumaryo, (2008) *Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia*, Disampaikan pada *Workshop Pengelolaan Wilayah Perbatasan*, Jurusan Ilmu HI/UPN Veteran, Yogyakarta, 18 November 2008, hlm. 1-4.
- Sutisna. (2010). “Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan Indonesia” dalam Ludiro Madu (Ed.). *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan, dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wuryandari, Genewati. (2012). “Keamanan dan Pengembangan Ekonomi di Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur”, *presentasi* dalam *Focus Group Discussion “Penyusunan Program Investasi Perbatasan”*, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kupang, 25-27 Juli 2012